

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan diproksikan dengan Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2021-2023. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Sensus sampling*, dimana seluruh populasi yang memenuhi kriteria tertentu diikutsertakan.

Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan		15
Jumlah sampel data keseluruhan (15 x 3 tahun)		45

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan periode penelitian 3 tahun, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 sampel.

4.2 Hasil Analisa Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Statistik Keuangan Daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari situs resmi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2021-2023. Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Modal. Dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diproksikan dengan Rasio

Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian. Hasil Pengujian statistik deskriptif dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPAD	45	-.351	.481	.08889	.142226
RDF	45	.036	.314	.10549	.077406
REFK	45	.000	.118	.01166	.030951
REFS	45	.843	1.084	1.00660	.040441
RKM	45	.038	.433	.12958	.115828
RBM	45	.072	.283	.13958	.048265
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai N menunjukkan jumlah sampel observasi. Dalam penelitian ini jumlah sampel observasi sebanyak 45, diambil dari data laporan publikasi tahunan Kabupaten/Kota Proinsi Lampung yang diterbitkan di Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021-2023. Berikut rincian data deskriptif yang telah diolah:

1. Variabel Kinerja Keuangan yang dihitung dengan Rasio Pertumbuhan PAD (RPAD) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,351 dan nilai maximum 0,481. Mean atau rata-rata sebesar 0,08889 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,142226 dimana nilai standar deviasi rasio pertumbuhan PAD lebih besar dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio pertumbuhan PAD adalah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel RPPAD cukup baik.
2. Variabel Kinerja Keuangan yang dihitung dengan Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,036 dan nilai maximum 0,314. Mean atau rata-rata sebesar 0,10549 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,077406 dimana nilai standar deviasi rasio desentralisasi fiskal lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio desentralisasi

fiskal adalah baik Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel RDF cukup baik.

3. Variabel Kinerja Keuangan yang dihitung dengan Rasio Efektivitas (REFK) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maximum 0,118. Mean atau rata-rata sebesar 0,01166 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,030951 dimana nilai standar deviasi rasio efektivitas lebih besar dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio efektivitas adalah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel REFK cukup baik.
4. Variabel Kinerja Keuangan yang dihitung dengan Rasio Efisiensi (REFS) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,843 dan nilai maximum 1,084. Mean atau rata-rata sebesar 1,00660 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,040441 dimana nilai standar deviasi rasio efisiensi lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio efisiensi adalah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel REFS cukup baik.
5. Variabel Kinerja Keuangan yang dihitung dengan Rasio Kemandirian (RKM) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,038 dan nilai maximum 0,433 Mean atau rata-rata sebesar 0,12958 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,115828 dimana nilai standar deviasi rasio kemandirian lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio kemandirian adalah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel RKM cukup baik.
6. Variabel Belanja Modal (RBM) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,072 dan nilai maximum 0,283. Mean atau rata-rata sebesar 0,13958 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,048265 dimana nilai standar deviasi rasio belanja modal lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel rasio belanja modal adalah baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel RBM cukup baik.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan agar model yang digunakan untuk bahan penelitian sudah memenuhi asumsi dasar dalam menganalisis regresi yang didalamnya terdapat uji sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyatakan uji asumsi klasik digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi, apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Klomogrov Smirnov*. Dengan kriteria nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01153838
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.064
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil dari uji normalitas menggunakan uji *one sample klomogrov smirnov* dengan jumlah sampel sebanyak 45 sampel. Hasil uji normalitas pada tabel di atas diperoleh nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05 atau $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya korelasi diantara variabel independe dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat di rolerir, yaitu Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.115	.049		-2.345	.024		
	RPAD	-.024	.014	-.179	-1.747	.088	.888	1.126
	RDF	-.976	.201	-3.957	-4.855	.000	.814	1.962
	REFK	.116	.063	.188	1.848	.072	.905	1.105
	REFS	.272	.049	.577	5.581	.000	.876	1.142
	RKM	.647	.135	3.927	4.809	.000	.914	1.230

a. Dependent Variable: RBM
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa perhitungan VIF variabel Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD) dan Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) masing-masing memiliki nilai VIF 1,126 dan 1,962 atau < 10, nilai tolerance 0,888 dan 0,814 atau > 0,10. Pada variabel Rasio Efektivitas (REFK) dan Rasio Efisiensi (REFS) masing-masing memiliki nilai VIF 1,105 dan 1,142 atau < 10, nilai tolerance 0,905 dan 0,876 atau > 0,10. Pada variabel Rasio Kemandirian (RKM) memiliki nilai VIF 1,230 atau < 10 dan tolerance 0,914 atau > 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel atau tidak terjadi multikolinearitas variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Ghozali (2018) menyatakan uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam analisis regresi. Metode pengujian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-Test) sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.797 ^a	.635	.588	.01226	1.974

a. Predictors: (Constant), RKM, REFS, RPAD, REFK, RDF

b. Dependent Variable: RBM

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai DW-Test sebesar 1,947. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat keyakinan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 45 sampel, serta jumlah variabel independen sebanyak 5 variabel, maka $K-1 = 4$. Pada tabel Durbin Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,3357, dU sebesar 1,7200 dan $4-dU$ ($4 - 1,7200 = 2,2800$). Sesuai ketentuan Uji Durbin Watson maka diperoleh: $dU < DW < 4 - dU$ atau $1,7200 < 1,974 < 2,2800$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi tersebut.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode ke periode lain. Apabila suatu penelitian tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas di suatu model regresi dapat dikatakan model regresi penelitian tersebut baik. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan $> 0,05$.

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.171	.314		-.544	.590
	RPAD	-.113	.088	-.204	-1.287	.206
	RDF	1.645	1.284	1.612	1.281	.208
	REFK	.277	.401	.108	.690	.494
	REFS	.193	.312	.099	.618	.540
	RKM	-1.088	.860	-1.596	-1.266	.213

a. Dependent Variable: Ares

Sumber: Hasil Olah SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* dengan diperoleh hasil bahwa nilai variabel Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Kemandirian memiliki nilai signifikan $> 0,05$ (0,206; 0,208; 0,494; 0,540; 0,213 $> 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, maka analisis regresi linear berganda dapat dilakukan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikan sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Adapun hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.115	.049		-2.345	.024
	RPAD	-.024	.014	-.179	-1.747	.088
	RDF	-.976	.201	-3.957	-4.855	.000
	REFK	.116	.063	.188	1.848	.072
	REFS	.272	.049	.577	5.581	.000
	RKM	.647	.135	3.927	4.809	.000

a. Dependent Variable: RBM

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Dari hasil analisis regresi di atas, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$BM = -0,115 + (-0,024) X_1 + (-0,976) X_2 + 0,116 X_3 + 0,272 X_4 + 0,647 X_5 + \varepsilon$$

Dari hasil persamaan diatas dapat dilihat hasil sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0115 untuk 1 satuan apabila semua variabel bersifat konstan.
- Nilai koefisien Rasio Pertumbuhan PAD (X1) terhadap Belanja Modal sebesar -0,024 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan Rasio Pertumbuhan PAD sebesar -0,024.
- Nilai koefisien Rasio Desentralisasi Fiskal (X2) terhadap Belanja Modal sebesar -0,976 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X2 sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar -0,976.
- Nilai koefisien Rasio Efektivitas (X3) terhadap Belanja Modal sebesar 0,116 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X3 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Rasio Efektivitas sebesar 0.116.

- e. Nilai koefisien Rasio Efisiensi (X4) terhadap Belanja Modal sebesar 0,272 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X4 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Rasio Efisiensi sebesar 0,272.
- f. Nilai koefisien Rasio Kemandirian (X5) terhadap Belanja Modal sebesar 0,647 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X5 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan Rasio Kemandirian sebesar 0,647.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Ghozali (2018) menyatakan uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Apabila nilai R^2 kecil, itu artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R^2 mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.797 ^a	.635	.588	.01226	1.974

a. Predictors: (Constant), RKM, REFS, RPAD, REFK, RDF

b. Dependent Variable: RBM

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* untuk variabel Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian diperoleh sebesar 0,635. Hal ini berarti bahwa 63,5% dari Rasio Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 36,5% dijelaskan oleh variabel lain.

4.3.2 Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji kelayakan model atau uji f diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak digunakan. Dalam hal ini layak (andal) menjelaskan terkait model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji f dengan SPSS versi 25:

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	5	.002	13.564	.000 ^p
	Residual	.006	39	.000		
	Total	.016	44			

a. Dependent Variable: RBM

b. Predictors: (Constant), RKM, REFS, RPAD, REFK, RDF

Sumber: Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil Uji f diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 13,564 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan F_{tabel} diperoleh melalui tabel F sehingga $df(N1) = k-1 = 5-1 = 4$ (pembilang) dan $df(N2) = n - k = 45-5 = 40$ (penyebut), maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,61. Artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,564 > 2,61$) dan tingkat signifikan $< 0,05$ atau ($0,000 < 0,05$). Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Rasio Belanja Modal dan model layak digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2018) menyatakan bahwa Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependenn dengan tingkat signifikan 0,05. apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10 Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.115	.049		-2.345	.024
	RPAD	-.024	.014	-.179	-1.747	.088
	RDF	-.976	.201	-3.957	-4.855	.000
	REFK	.116	.063	.188	1.848	.072
	REFS	.272	.049	.577	5.581	.000
	RKM	.647	.135	3.927	4.809	.000

a. Dependent Variable: RBM

Sumber: Hasil Olah SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.10 terdapat t hitung untuk setiap variabel sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel T ($\alpha = 5\%$ atau 0,05)

1. Hasil untuk variabel Rasio Pertumbuhan PAD (X1) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,088 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a1} ditolak dan menerima H_{o1} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal.
2. Hasil untuk variabel Rasio Desentralisasi Fiskal (X2) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} diterima dan menolak H_{o2} yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal.
3. Hasil untuk variabel Rasio Efektivitas (X3) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,072 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a3} ditolak dan menerima H_{o3} yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal.
4. Hasil untuk variabel Rasio Efisiensi (X4) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a4} diterima dan menolak H_{o4} yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal.
5. Hasil untuk variabel Rasio Kemandirian (X5) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu H_{a5} diterima dan

menolak H_0 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi analisis untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2021-2023.

4.4.1 Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selama periode 2021-2023 tidak serta merta meningkatkan belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah. Dengan kata lain, meskipun PAD bertumbuh, daerah masih memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang.

Pertumbuhan PAD yang tidak mempengaruhi belanja modal tercermin dalam fleksibilitas penggunaan PAD itu sendiri. Berbeda dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang sering kali memiliki peruntukan yang lebih spesifik, PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Namun, fleksibilitas ini juga berarti bahwa peningkatan PAD tidak selalu dialokasikan untuk belanja modal, melainkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti program-program sosial, peningkatan pelayanan publik, dan tugas-tugas daerah. Selain itu, pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat lebih difokuskan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, yang berarti bahwa persentase yang lebih kecil akan dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan alokasi semakin dipengaruhi oleh strategi keuangan dan tujuan pembangunan masing-masing daerah, bahkan ketika terjadi peningkatan PAD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2024), yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD tidak selalu berdampak signifikan pada belanja modal karena peningkatan pendapatan asli daerah sering kali digunakan untuk menutup belanja rutin daripada dialokasikan untuk investasi modal. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliya & Hidajat (2024) serta Andriyani *et al.*, (2020), yang menemukan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Perbedaan ini bisa terjadi karena faktor lain seperti kebijakan fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer, serta prioritas belanja yang berbeda di masing-masing daerah.

Dengan demikian, meskipun teori menyatakan bahwa peningkatan PAD seharusnya dapat meningkatkan kapasitas belanja modal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemerintah daerah di Lampung belum mampu secara optimal mengalokasikan PAD untuk belanja modal. Kemungkinan besar, belanja modal di daerah lebih banyak dipengaruhi oleh sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang memang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya.

4.4.2 Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hoipotesis, meskipun rasio desentralisasi fiskal tergolong rendah, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tetap memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Rendahnya rasio desentralisasi fiskal mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih minim, sehingga sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk dalam alokasi belanja modal. Namun, meskipun tingkat desentralisasi fiskal masih rendah, tetap ada pengaruh terhadap belanja modal karena sebagian dari dana transfer yang diterima daerah tetap diarahkan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal juga dapat terlihat dari bagaimana pemerintah daerah mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia. Meskipun kapasitas fiskal daerah masih terbatas, daerah dengan kebijakan pengelolaan anggaran yang efektif dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan belanja modal. Selain itu, dorongan dari pemerintah pusat melalui program-program pembangunan dan kebijakan desentralisasi tetap memungkinkan daerah dengan rasio desentralisasi fiskal yang rendah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun tingkat desentralisasi fiskal masih belum optimal, daerah tetap dapat meningkatkan belanja modal dengan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien, peningkatan PAD, serta optimalisasi penggunaan dana transfer agar dapat memperkuat pembangunan jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yanto & Astuti (2020) serta Devi *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal.

4.4.3 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t, rasio efektivitas tergolong rendah dan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Rendahnya rasio efektivitas mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup signifikan untuk mendorong peningkatan belanja modal. Dalam kondisi seperti ini, meskipun pemerintah daerah memiliki anggaran, keterbatasan dalam pencapaian target pendapatan dapat menghambat pengalokasian dana untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

Kecenderungan pemerintah daerah untuk membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan rutin menjadi alasan mengapa rasio efektivitas tidak berpengaruh pada belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya dengan lebih hati-hati ketika pendapatan daerah tidak efektif, untuk

memastikan bahwa pengeluaran rutin seperti program operasional dan pemeliharaan layanan publik tetap berjalan dengan baik. Selain itu, dalam situasi ketika target pendapatan tidak tercapai dengan baik, daerah dapat memilih untuk memprioritaskan belanja yang sudah menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas fiskal. Ketergantungan pada sumber pembiayaan dari luar, seperti transfer dari pemerintah pusat, yang lebih sering digunakan untuk mendukung belanja modal dan proyek-proyek infrastruktur, merupakan masalah lain. Oleh karena itu, keputusan alokasi anggaran dipengaruhi oleh manajemen keuangan yang lebih komprehensif dan efektivitas pendapatan daerah, yang merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan, tidak selalu langsung mengarah pada belanja modal yang lebih tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi *et al.*, (2022) dan Hidayat *et al.*, (2024) menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini, yaitu rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, meskipun efektivitas pengumpulan pendapatan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas saja tidak cukup untuk meningkatkan belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih strategis dan memastikan bahwa peningkatan pendapatan juga diiringi dengan peningkatan alokasi untuk belanja modal.

4.4.4 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio efisiensi menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah mendistribusikan dan menggunakan dana untuk investasi infrastruktur atau aset tetap yang mendukung layanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, rasio efisiensi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tergolong tinggi, yang menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun rasio efisiensi tinggi, namun memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang besar untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pengelolaan anggaran menjadi kurang optimal. Ketidakefisienan ini dapat disebabkan oleh tingginya belanja operasional, pemborosan anggaran, atau kurangnya strategi dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan. Meskipun demikian, belanja modal tetap terdampak karena sebagian dari anggaran daerah masih dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap, meskipun jumlahnya mungkin tidak optimal.

Pengaruh rasio efisiensi terhadap belanja modal dapat terjadi karena meskipun pengelolaan keuangan daerah tidak efisien, kebijakan pemerintah daerah tetap mendorong pengeluaran untuk sektor investasi. Dalam beberapa kasus, meskipun rasio efisiensi tinggi, pemerintah daerah dapat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman daerah untuk membiayai belanja modal. Selain itu, adanya alokasi anggaran yang bersifat wajib untuk proyek pembangunan juga dapat menjelaskan mengapa belanja modal tetap dipengaruhi oleh rasio efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun rasio efisiensi yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan, belanja modal tetap terdorong oleh kebijakan penganggaran dan kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani *et al.*, (2020) & Devi *et al.*, (2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya belanja modal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi anggaran, dan memastikan bahwa alokasi belanja dilakukan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.

4.4.5 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, rasio kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, meskipun rasio kemandirian keuangan daerah tergolong

rendah. Rendahnya rasio kemandirian mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama dalam membiayai pengeluaran daerah. Ketergantungan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan masih terbatas, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dibandingkan dengan inisiatif daerah sendiri. Namun, meskipun tingkat kemandirian fiskal rendah, belanja modal tetap mengalami peningkatan karena sebagian besar dana transfer, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), diarahkan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

Pengaruh rasio kemandirian terhadap belanja modal dapat terjadi karena pemerintah daerah masih memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi sektor pembangunan, meskipun sumber pendanaannya berasal dari transfer pusat. Selain itu, meskipun PAD yang diperoleh relatif kecil, sebagian dari pendapatan tersebut tetap digunakan untuk mendukung investasi jangka panjang guna meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, meskipun rasio kemandirian yang rendah menunjukkan keterbatasan dalam pendanaan mandiri, belanja modal tetap terpengaruh karena adanya mekanisme alokasi anggaran yang tetap mengutamakan pembangunan, baik dari dana daerah sendiri maupun dari transfer pusat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulientinah & Nur (2021) & Nuraeni *et al.*, (2024), yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rasio kemandirian merupakan faktor penting dalam peningkatan belanja modal. Daerah yang mampu mengelola keuangannya sendiri dengan baik akan lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah guna memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.